

**ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN
SEKTOR BASIS KABUPATEN PURWOREJO**

LAPORAN PENELITIAN



Oleh:

ISTIKO AGUS WICAKSONO, S.P.

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

2008

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Sektor Bisnis Kabupaten Purworejo
- b. Kategori Penelitian : Bidang Ilmu Pertanian
- c. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial Ekonomi Pertanian
2. Kepala Peneliti
- a. Nama dan Gelar Akademik : Istiko Agus Wicaksono, S.P.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NBM : 898.362
- d. Pangkat/Golongan : III/b
- e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- f. Fakultas /Jurusan : Pertanian/Agribisnis
- g. Universitas : Muhammadiyah Purworejo
- h. Alamat : Jln K.H.A. Dahlan No.3 Purworejo 54111
- i. Telepon/Fax/e-mail : 0275 321 494
- j. Telepon/HP : 081 568 950 57
- k. Alamat Rumah : Perum Boro Mukti CIII/14 Purworejo
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 orang
4. Lokasi Penelitian : Purworejo
5. Jangka waktu Penelitian : 24 minggu
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Sumber Dana : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Purworejo, Desember 2008

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Pertanian



Jr. Zulfanita, M.P.
NBM: 866.362



Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Drs. Budiyono, M.Si.

NIP.19550430 198703 1001

Ketua Peneliti

Istiko Agus Wicaksono, S.P.
NBM. 898.362

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas selesainya laporan penelitian dengan judul “ **Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Sektor Basis Kabupaten Purworejo**”. Laporan ini disusun oleh tim peneliti Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Penulis menyadari bahwa kegiatan penelitian tidak akan terwujud tanpa bantuan peran serta berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas semua dukungan tersebut penulis sampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan ikhlas membantu hingga selesainya laporan penelitian ini.

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah dengan tulus ikhlas diberikan kepada penulis diterima sebagai amal baik dan memperoleh balasan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dari pembaca semoga dimasa yang akan datang penelitian semacam ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Purworejo, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
INTISARI.....	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori.....	8
2.2.1. Pembangunan Ekonomi	8
2.2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	10
2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi	10
2.2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
2.2.6. Teori Perubahan Struktur Ekonomi	18
2.2.7. Teori Basis Ekonomi	21
2.3. Kerangka Pemikiran.....	22
2.4. Hipotesis.....	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Dasar.....	25
3.2. Penentuan Daerah Penelitian.....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data	25
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.5. Definisi Operasional	26

3.6. Analisis Data	27
1. Analisis Tipologi Klassen	27
2. Analisis Shift Share	29
3. Analisis Location Quotient (LQ)	30
IV. KONDISI UMUM KABUPATEN PURWOREJO	
4.1. Keadaan Geografis dan Administratif.....	33
4.2. Keadaan Iklim	33
4.3. Keadaan Kependudukan	34
4.4. Pertanian Tanaman Pangan	35
4.5. Perkebunan	36
4.6. Peternakan	37
4.7. Perikanan	38
4.8. Kehutanan	38
4.9. Perindustrian	38
4.10. Pertambangan	39
4.11. Energi	39
4.12. Perdagangan	40
4.13. Transportasi dan Komunikasi	40
4.14. Hotel dan Pariwisata	41
4.15. Keuangan	41
V. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
5.1. Analisis Tipologi Klassen	42
5.2. Analisis <i>Shift-Share</i>	46
5.3. Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>	51
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	54
6.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2006 (Persen)	2
Tabel 1.2. PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 (Jutaan Rupiah)	3
Tabel 2.1. Klasifikasi Pertumbuhan Daerah	19
Tabel 5.1. Rata-rata Laju PDRB Perkapita di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2000-2006.....	43
Tabel 5.2. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo Menurut Tipologi Klassen	44
Tabel 5.3. Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo	49
Tabel 5.4. Klasifikasi Sektor Basis Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	24
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo Menurut Tipologi Klassen.
- Lampiran 2. Pergeseran Struktur Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
- Lampiran 3. Rata-rata LQ Sektor-sektor Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo.

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN SEKTOR BASIS KABUPATEN PURWOREJO

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) posisi perekonomian masing-masing kecamatan di Kabupaten Purworejo; (2) struktur pertumbuhan ekonomi tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo terhadap struktur ekonomi Kabupaten Purworejo; (3) sektor-sektor yang menjadi sektor basis pada kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah PDRB dan pendapatan perkapita pada kecamatan di Kabupaten Purworejo, PDRB dan pendapatan perkapita Kabupaten Purworejo dari tahun 2000-2006 menurut harga konstan tahun 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh yaitu Banyuurip, Kutoarjo, dan Pituruh. Sedangkan kecamatan yang merupakan daerah berkembang cepat yaitu Purwodadi, Purworejo, dan Butuh. Daerah dengan klasifikasi daerah maju tapi tertekan di Kabupaten Purworejo yaitu Bagelen, Kaligesing, Kemiri, dan Gebang. Kecamatan di Kabupaten Purworejo yang tergolong pada klasifikasi daerah relatif tertinggal yaitu Grabag, Ngombol, Bruno, Loano, dan Bener. Berdasarkan analisis *shift-share*, komponen terbesar yang menyusun pertumbuhan ekonomi seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah komponen pertumbuhan nasional. Adapun hasil analisis *Location Quotient*, sektor basis yang paling banyak terdapat pada kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sektor pertanian yaitu sebesar 75,00% dari jumlah kecamatan, menyusul kemudian sektor pertambangan dan penggalian sebesar 62,50% dari jumlah kecamatan. Sedangkan sektor basis yang paling sedikit terdapat pada kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, yaitu masing-masing sebesar 12,50% dari jumlah kecamatan.

Kata kunci : Sektor Basis, Pertumbuhan, Perubahan Struktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU No.25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” yang kemudian diperbaharui kembali dengan UU No.34 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, maka otonomi daerah diberlakukan di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengaturan keuangan daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah khususnya di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan dampak positif karena daerah otonom dapat dengan leluasa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakatnya. Guna menuju kemandirian, sudah saatnya daerah otonom harus menggali semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya teknologi (Mehrtens dan Abdurahman, 2007). Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Pembangunan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan potensi, kondisi, masalah serta kebutuhan tiap-tiap kabupaten dan kota tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antar sektor.

Pertumbuhan ekonomi disetiap daerah berbeda-beda, ada yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan ada pula yang mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang sama di sebabkan oleh perbedaan jumlah sumber daya alam yang di miliki, perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan jumlah investor yang masuk ke daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2000-2006 (Persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2001	3,55
2002	4,88
2003	3,64
2004	4,17
2005	4,85
2006	5,23

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo.

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa tahun 2001 sampai 2002 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 3,64%. Tahun 2004 sampai 2006 kembali meningkat kembali menjadi 5,23%.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah bisa dicapai antara lain dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor unggulan di daerah tersebut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dapat dilihat Tabel 1.2 distribusi PDRB Kabupaten Purworejo menurut lapangan usaha tahun 2006.

Tabel 1.2. PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 (Jutaan Rupiah).

Lapangan Usaha	PDRB (Rupiah)	Distribusi Prosentase (%)
Pertanian	877.629,93	35,93
Pertambangan dan Penggalian	55.019,81	2,25
Industri Pengolahan	233.649,63	9,56
Listrik, Gas dan Air Bersih	12.578,15	0,51
Bangunan/Konstruksi	135.186,75	5,53
Perdagangan, Hotel dan Restoran	409.476,49	16,76
Angkutan & Komunikasi	146.149,54	5,98
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	131.731,64	5,39
Jasa - jasa	441.505,36	18,07
Total PDRB	2.442.927,30	100

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki sumbangan terbesar dalam PDRB Kabupaten Purworejo adalah sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan, dan sektor industri. Dominasi kontribusi sektoral pada kecamatan di Kabupaten Purworejo tidak hanya didominasi oleh suatu sektor saja tetapi oleh sektor yang berbeda-beda. Ada kecamatan yang kontribusi sektoralnya didominasi oleh sektor pertanian, sektor industri ataupun sektor perdagangan. Hal ini berarti kemampuan sektoral setiap daerah berbeda-beda

tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki serta kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Widodo (2006) mengatakan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sektor ekonomi dimulai dengan melakukan identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau yang mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor di masa mendatang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik.

Identifikasi sektor unggulan salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode ekonomi basis. Pengertian sektor basis (sektor unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Suatu sektor dikatakan unggul (basis) apabila sektor tersebut mampu mengekspor produknya ke daerah lain, begitu pula sebaliknya bila suatu sektor tidak mampu mengekspor produknya dan bahkan harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain maka sektor tersebut adalah sektor non basis.

Apabila disuatu daerah banyak memiliki sektor basis maka semakin banyak produk yang diekspor ke luar daerah, hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan daerah tersebut, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian akan terdapat hubungan antara banyaknya sektor basis dengan peningkatan pendapatan daerah yang dalam hal ini diwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Tiap kecamatan mempunyai sektor basis yang berbeda-beda, atas dasar ini penulis tertarik untuk meneliti “**Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Sektor Basis Kabupaten Purworejo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target dari pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dengan peningkatan kinerja sektoral. Kinerja sektoral dapat dikatakan berhasil apabila sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal dan bisa melakukan ekspor ke luar daerah, sehingga sektor ini disebut dengan sektor basis. Semakin banyak sektor basis maka diharapkan semakin banyak pula pendapatan daerah yang bisa dihasilkan, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana posisi perekonomian masing-masing kecamatan di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana struktur pertumbuhan tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo terhadap struktur ekonomi Kabupaten Purworejo?

3. Sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor basis pada kecamatan di Kabupaten Purworejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui posisi perekonomian masing-masing kecamatan di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menganalisis struktur pertumbuhan ekonomi tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo terhadap struktur ekonomi Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis di kecamatan di Kabupaten Purworejo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam merumuskan strategi kebijakan dan program pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah setempat.
2. Bagi ilmu pengetahuan, dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya sumber-sumber data pustaka untuk kepentingan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purworejo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Suyatno (2000), menggunakan metode *LQ* (*Location Quotient*), *DLQ* (*Dynamic Location Quotient*) dan *TSS* (*Total Shift-Share*) dengan judul *Analisis Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999*, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Sektor lain yang masih dapat diunggulkan adalah keuangan, persewaan, dan jasa usaha serta sektor jasa, sedangkan sektor yang mengalami reposisi menjadi sektor non basis adalah sektor listrik dan air bersih serta sektor bangunan.

Nastiti (2002) melakukan penelitian tentang analisis Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1991-2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran pertumbuhan ekonomi untuk ketiga sektor (primer, sekunder, tersier) di wilayah DIY. Hasil ini dapat dilihat dari hasil analisis *Shift-Share* untuk penentuan tipologi *Klassen*. Untuk sektor primer Kabupaten Gunung Kidul merupakan sektor basis dengan pertumbuhan yang cepat dan untuk sektor sekunder Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan sektor basis dengan pertumbuhan sektor sekundernya cepat dan untuk sektor tersier Kodya Yogyakarta merupakan sektor basis dengan pertumbuhan yang cepat pula. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sektor primer terutama

sektor pertanian masih dominan peranan/kontribusinya terhadap perekonomian wilayah DIY dan dari hasil penentuan tipologi *Klassen* menunjukkan bahwa ada pergeseran pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor perekonomian wilayah DIY dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1991 sampai tahun 2000.

Hasil penelitian Jubaedah (2001) yang melakukan identifikasi sektor ekonomi dan prospek pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwa kontribusi sektor yang paling besar adalah sektor pertanian yaitu rata-rata sebesar 50,4 persen. Berdasarkan perhitungan menggunakan alat analisis *LQ* diidentifikasi hanya ada satu sektor ekonomi yang dapat dijadikan unggulan atau basis di Kabupaten Brebes karena mempunyai $LQ > 1$, yaitu sektor pertanian. Hasil analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Brebes periode 1993-1998 mengalami peningkatan sebesar Rp 287.287.742.000,00 atau meningkat rata-rata Rp 47.881.290.000,00 per tahun. Peningkatan PDRB tersebut paling besar adalah dari sektor pertanian.

2.2. Landasan teori

2.2.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara, pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) (Sudjijono, 2008). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Arsyad (2004), pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu

proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Proses disini berarti adanya perubahan yang terus menerus dalam usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dan dianalisis sehingga diketahui deretan peristiwa yang timbul serta akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi. Perbaikan kelembagaan itu sendiri dilakukan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya).

Nilai inti pembangunan mencakup kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self esteem*) serta kebebasan (*freedom*) yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat. Nantinya nilai inti pembangunan ini akan bermuara pada tiga tujuan inti pembangunan yaitu : (1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, (2) peningkatan standar hidup, (3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2003).

Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian (Sudjijono, 2008).

2.2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru guna merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dan pemerintah bersama dengan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif untuk membangun daerah (Arsyad, 2004).

Menurut Koncoro (2000), pembangunan regional sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik setiap daerah. Pembangunan juga harus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat lokal, pendapatan perkapita masyarakat tersebut akan meningkatkan daya tarik daerah untuk menarik investor guna menanamkan modalnya didaerah, yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pendekatannya pada tiga aspek yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” dimana dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan “output per kapita” yakni sisi

output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, kenaikan output perkapita selama satu tahun atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output perkapita bukan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan pemikiran tersebut Widodo (2006) mengungkapkan lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi disuatu negara atau daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan kurun waktu tertentu, tetapi dapat pula secara tahunan.

Menurut Todaro (2000), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama dalam melakukan analisis perekonomian karena memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro lain. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembang aktivitas perekonomian baik aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan daerah tersebut yang kemudian berdampak pada

penyerapan tenaga kerja (Widodo, 2006). Untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah (Syafrizal, 1997).

2.2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Kuznets

Kuznets (1971) dalam Todaro (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk. Enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui pada suatu negara yang sekarang maju menurut Kuznets adalah (1) tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi; (2) tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi; (3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi; (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (5) adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru; (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Teori Pertumbuhan Ahli-Ahli Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada

banyak factor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi dan pendapatan.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relative berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas marginal penduduk telah menjadi negative. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Perekonomian akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (Stationary State). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Ia hanya mampu mengundurkan terjadinya keadaan tersebut (Sukirno, 2002)

Teori Pertumbuhan Scumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Scumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan dari mengadakan pembaruan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi Negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Maka menurut Scumpeter, investasi boleh dibedakan dalam dua golongan. Penanaman modal outonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal outonomi

adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi.

Menurut Scumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu perekonomian makin terbatas kemungkinan mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau *stationary state*. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Scumpeter tingkat keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pembangunan yang tinggi. (Seperti telah diterangkan, menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali ditingkat pendapatan cukup hidup, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah) (Sukirno, 2002).

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Dengan menggunakan pemisalan-pemisalan: (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap, dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Teori Harrod-Domar adalah perluasan dari analisis Keynes. Dengan demikian teori itu berpendapat bahwa kapasitas penuh pada tahun berikut akan tercapai apabila pengeluaran agregat bertambah dengan cukup besar sehingga tercapai keadaan:

$$\Delta c = \Delta Y$$

Teori Keynes telah menerangkan, apabila pertambahan pengeluaran agregat (misalnya ΔI) maka pendapatan nasional akan bertambah. Besarnya pertambahan pendapatan nasional tergantung kepada besarnya multiplier, dan pertambahan pendapatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\Delta Y = \frac{1}{MPS} \Delta I$$

Pada analisis Harrod-Domar menunjukkan bahwa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh investasi tahun berikutnya harus bertambah sebanyak $\Delta I/I$ kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian dalam analisis Harrod-Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh dalam jangka panjang.

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Sebagai suatu perluasan dari teori Keynes, teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat-melalui kenaikan investasi-bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan (tingkat pertumbuhan itu dinamakan tingkat pertumbuhan yang perlu dijamin atau *warranted rate of growth*). Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solo-seorang akademisi yang pernah mengajar di MIT dan juga seorang pemenang hadiah Nobel- pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dengan demikian pada teori pertumbuhan Neo Klasik menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung kepada (1) pertambahan modal dan

produktivitas marginal, (2) penambahan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja, dan (3) perkembangan teknologi (Sukirno, 2002).

2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling penting kalau dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) dapatlah diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu.

Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga cara penghitungan yaitu:

1. Cara pengeluaran. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam Negara tersebut.
2. Cara produksi. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian.
3. Cara pendapatan. Dalam penghitungan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional (Sukirno, 2002).

Dalam penghitungan pendapatan nasional dapat digunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu Negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut.

Cara ini adalah cara yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Bolehlah diramalkan bahwa apabila dibandingkan data pendapatan nasional dalam berbagai tahun tersebut, nilainya akan berbeda-beda dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sesuatu perekonomian diukur dari penambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil (Sukirno, 2002).

2.2.6. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur perekonomian tentunya akan mempengaruhi pola pembagian pendapatan antar penduduk dan antar sektor perekonomian serta akan menyebabkan terjadi pemindahan alokasi tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi, dalam jangka panjang sektor ekonomi akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi, perubahan ini akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan dan pendapatan antar sektor perekonomian dan pada gilirannya akan terjadi kesenjangan pendapatan penduduk.

Syafrizal (1997), menggunakan analisis *Klassen Typology* untuk mengkaji pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dengan membandingkan laju

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita propinsi-propinsi yang ada di wilayah Indonesia Bagian Barat. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah/sektor adalah sebagai berikut :

- a. Daerah maju dan tumbuh cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang diacunya.
- b. Daerah maju tapi tertekan, adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan daerah yang diacunya.
- c. Daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan daerah yang diacunya.
- d. Daerah relatif tertinggal, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan daerah yang diacunya.

Tabel. 2.1. Klasifikasi Pertumbuhan Daerah

	$y_i < y$	$y_i > y$
$r_i > r$	Daerah berkembang cepat	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
$r_i < r$	Daerah relatif tertinggal	Daerah maju tetapi tertekan

Keterangan:

- y_i = laju pertumbuhan ekonomi daerah
- y = laju pertumbuhan ekonomi daerah acuan
- r_i = pendapatan perkapita daerah
- r = pendapatan perkapita daerah acuan

Sedangkan untuk mengetahui adanya perubahan ekonomi (misalnya pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan) suatu variabel regional sektor dalam

suatu daerah digunakan analisis *shift share*. Secara ringkas, dengan analisis *Shift-share* dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif (Bendavid-Val, 1991).

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dimana :

D_{ij} : perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun waktu tertentu.

N_{ij} : komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j

M_{ij} : bauran industri sektor i di wilayah j

C_{ij} : keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

Persamaan diatas menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan (*decompose*) atas 3 bagian, yaitu (Syafriзал, 1997):

1. *Regional Share* (Komponen Pertumbuhan Nasional): adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah.
2. *Proportionality Shift* (Bauran Industri): adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.
3. *Differential Shift* (Keunggulan Kompetitif) : adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan Keuntungan Kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

2.2.7. Teori Basis Ekonomi

Bendavid – Val (1991), mengatakan banyak pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor atau komoditas dalam pertumbuhan ekonomi regional antara lain analisis ekonomi (*Economy Competition Analysis*) dan analisis basis ekonomi (*Economic Base Analysis*). Dalam analisis komposisi ekonomi kajian lebih ditekankan untuk melihat pangsa (*share*) dari masing-masing sektor atau komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Analisis basis ekonomi yang berpijak kepada teori basis ekonomi (*Economic Base Theory*), lebih mengarah kepada analisis penentuan sektor basis yang berorientasi ekspor sebagai basis perekonomian suatu wilayah. Urugensi dari analisis ini berangkat dari jiwa teori basis ekonomi yang berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan luar wilayah terhadap produk-produk yang dihasilkannya.

Pada umumnya teori basis ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang termasuk sektor basis maupun non basis pada suatu daerah. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor akan menghasilkan kekayaan bagi daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999).

Menurut Tarigan (2004), analisis *Location Quotient* (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut disuatu daerah di atasnya.

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana:

LQ = *Location Quotient* (LQ)
 v_i = Nilai tambah sektor i ditingkat daerah
 v_t = PDRB ditingkat daerah
 V_i = Nilai tambah sektor i ditingkat nasional
 V_t = PDRB ditingkat nasional

Richardson (1977), menyatakan bahwa model teori ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah terdiri atas dua sektor:

1. Sektor unggulan, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Ini berarti daerah secara tak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.
2. Sektor non unggulan yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar didaerah itu sendiri.

2.3 Kerangka Pemikiran

Ekonomi regional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk memberikan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, terutama aspek ekonomi yang tertuang dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang pesat.

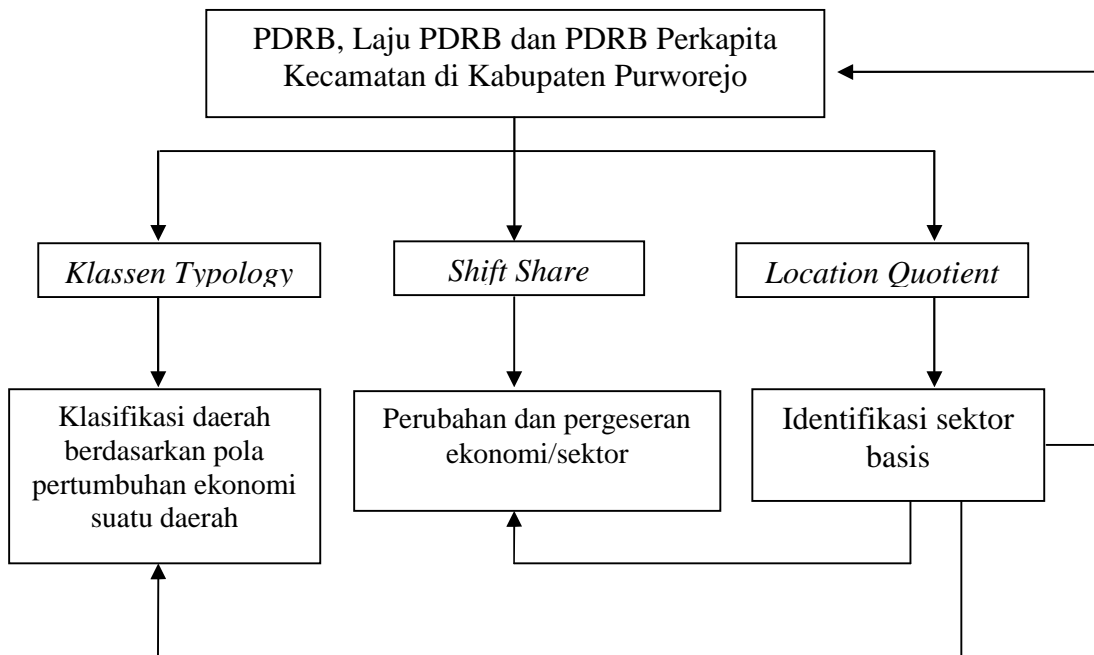
Sebagai tahapan awal pengambilan kebijakan ekonomi daerah, dilakukan klasifikasi daerah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah dengan menggunakan analisis *Klassen Typology*. Dengan demikian dapat diketahui gambaran tentang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Setelah itu dilakukan analisis *Shift Share*, yaitu untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi daerah dan komponen pendukungnya. Dengan demikian dapat diketahui komponen pertumbuhan ekonomi apa yang paling dominan dalam membentuk struktur ekonomi daerah tersebut, apakah *Regional Share*, *Proportionality Shift (Mixed Shift)* dan *Differential Shift (Competitive Shift)*. Dimana *regional share* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah, *Proportionality Shift (Mixed Shift)* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik dan *Differential Shift (Competitive Shift)* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilakukan dengan menentukan sektor apa saja yang menjadi sektor basis. Dimana sektor basis adalah sektor yang mampu mengekspor hasil produksinya keluar daerah, begitu pula sebaliknya sektor non basis adalah sektor yang mengimpor produk dari daerah lain. Perekonomian diprioritaskan pada sektor basis tersebut, karena

sektor basis bisa menghasilkan pendapatan besar dari ekspor daerah yang kemudian bisa memacu sektor-sektor lain untuk ikut berkembang.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar. 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Purworejo berada pada posisi daerah relatif tertinggal.
2. Komponen pertumbuhan nasional mendominasi sebagian besar pertumbuhan ekonomi Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
3. Diduga sektor pertanian merupakan sektor basis pada sebagian besar kecamatan di Kabupaten Purworejo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Dasar

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu melalui pengumpulan data, penyusunan data yang diperoleh kemudian di analisis (Kuncoro, 2003).

3.2. Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kabupaten Purworejo, mencakup 16 kecamatan, dimana tiap kecamatan tersebut mempunyai topografi dan kekayaan alam yang berbeda-beda sehingga dimungkinkan mempunyai sektor basis yang berbeda-beda pula.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*Time Series*) selama 7 tahun yaitu mulai tahun 2000 sampai 2006. Adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2000-2006 menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan tahun 2000.
2. Data PDRB Kecamatan di Kabupaten Purworejo tahun 2000-2006 menurut lapangan usaha, atas dasar harga konstan tahun 2000.

3. Data pendapatan per kapita Kabupaten Purworejo tahun 2000-2006 atas dasar harga konstan tahun 2000.
4. Data pendapatan perkapita Kecamatan di Kabupaten Purworejo tahun 2000-2006 atas dasar harga konstan tahun 2000.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperkuat landasan teori yang dapat mendukung penelitian yang disarikan dari literatur atau buku-buku, artikel ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pencatatan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo.

3.5. Definisi Operasional

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah/wilayah.
2. PDRB per kapita adalah PDRB per kapita kecamatan atas dasar harga konstan 2000 yang diperoleh dari hasil bagi PDRB per kapita kecamatan berdasarkan lapangan usaha (sektor) dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya.

3. PDRB atas dasar harga konstan 2000 adalah jumlah seluruh agregat ekonomi yang dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar yaitu 2000.
4. Sektor ekonomi adalah lapangan usaha yang ada dalam PDRB yang meliputi 9 sektor lapangan usaha yaitu : (1) sektor pertanian, (2) sektor pertambangan dan penggalan, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor listrik, gas dan air bersih , (5) sektor bangunan/konstruksi, (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (7) sektor pengangkutan dan komunikasi, (8) sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan (9) sektor jasa-jasa.
5. Sektor basis adalah kegiatan perekonomian yang mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan mampu melakukan ekspor keluar daerahnya, dicerminkan dengan nilai $LQ > 1$.
6. Sektor non basis adalah sektor yang hanya mampu atau belum mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik , dicerminkan dengan nilai $LQ \leq 1$.
7. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digambarkan sebagai laju PDRB.

3.6. Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Tipologi Klassen

Analisis ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah menggunakan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita antar daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata Produk domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai sumbu horisontal.

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi per kecamatan dan pendapatan perkapita per kecamatan. Dalam hal ini kecamatan yang diamati diklasifikasi menjadi 4 karakteristik, yaitu daerah/kecamatan yang maju dan tumbuh cepat (*High Growth And High Income*), daerah/kecamatan maju tapi tertekan (*High Income But Low Growth*), daerah/kecamatan yang berkembang cepat (*High Growth Low Income*), dan daerah/kecamatan yang relatif tertinggal (*Low Growth And Low Income*), (Syafrizal, 1997). Kriteria yang digunakan untuk membagi kecamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Daerah maju dan tumbuh cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.
- b. Daerah maju tapi tertekan, adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.
- c. Daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya
- d. Daerah relatif tertinggal, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 3.1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

y_i = laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan di Kabupaten Purworejo

y = laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo

r_i = pendapatan perkapita Kecamatan di Kabupaten Purworejo

r = pendapatan perkapita Kabupaten Purworejo

2. Analisis *Shift Share*

Metode ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan yang dimiliki suatu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan digunakannya metode ini dalam analisa ekonomi adalah untuk mengetahui produktivitas perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian dalam skala kabupaten maupun propinsi.

Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi referensi kabupaten atau nasional (*National Growth Effect*) yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah, (2) pergeseran proporsional (*Proporsional Shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor didaerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi kabupaten. Pergeseran proporsional tersebut juga pengaruh bauran industri (*Industri Mix*), (3) pergeseran diferensial (*Differential Shift*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri lokal dengan perekonomian yang dijadikan referensi.

Jika pergeseran deferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial ini disebut juga

pengaruh keunggulan kompetitif. Formula yang digunakan dalam analisis shift share adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dimana :

D_{ij} = Perubahan pertumbuhan PDRB sektor i pada kecamatan di Kabupaten Purworejo

$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$ (Pertumbuhan Nasional sektor i pada kecamatan di Kabupaten Purworejo)

$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$, (Bauran sektor i kecamatan di Kabupaten Purworejo)

$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$, (Keunggulan kompetitif sektor i pada kecamatan di Kabupaten Purworejo)

Pada persamaan diatas, r_{ij} mewakili laju pertumbuhan wilayah per sektor, sedangkan r_n dan r_{in} masing-masing laju pertumbuhan nasional per sektor yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

$R_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij}$ (Pertumbuhan PDRB sektor i pada kecamatan di Kabupaten Purworejo)

$R_{in} = (E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$ (Pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten Purworejo)

$R_n = (E^*_n - E_n)/E_n$ (Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo)

Dimana:

E^*_{ij} : PDRB sektor i di wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo pada tahun akhir analisis

E_{ij} : PDRB sektor i di wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo pada tahun awal analisis

E^*_{in} : PDRB sektor i di Kabupaten Purworejo pada tahun akhir analisis

E_{in} : PDRB sektor i di Kabupaten Purworejo pada tahun awal analisis

E^*_n : PDRB Kabupaten Purworejo pada tahun awal analisis

E_n : PDRB Kabupaten Purworejo pada tahun akhir analisis

3. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) adalah suatu alat analisis untuk mengklasifikasikan sektor-sektor yang menjadi basis sebagai penentu

pertumbuhan disuatu daerah. Metode perhitungan dengan *Location Quotient* (LQ) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan presentase sumbangan masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan di Kabupaten Purworejo dengan presentase sumbangan masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo.

Analisis *Location Quotient* (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut disuatu daerah di atasnya (Tarigan, 2004).

$$LQ = \frac{x_i/PDRB_i}{x_j/PDRB_j}$$

Dimana:

LQ = *Location Quotient* (LQ)

X_i = Nilai tambah sektor i Kecamatan di Kabupaten Purworejo

X_j = Nilai tambah sektor i Kabupaten Purworejo

PDRB_i = PDRB Kecamatan di Kabupaten Purworejo

PDRB_j = PDRB Kabupaten Purworejo

Selanjutnya Bendavid-Val (1991) memberikan pengukuran terhadap derajat spesialisasi dengan kriteria sebagai berikut: jika koefisien LQ suatu sektor lebih besar dari satu (LQ>1), berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat kabupaten. Sektor yang bersangkutan merupakan sektor basis yang harus dikembangkan, karena prospektif dalam peningkatan PDRB daerah. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah lebih besar dari kontribusi sektor yang sama di tingkat kabupaten. Jika koefisien LQ suatu sektor sama dengan satu (LQ=1), berarti tingkat

spesialisasi sektor tersebut pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat kabupaten. Kontribusi sektor yang bersangkutan terhadap PDRB daerah sama dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat kabupaten. Jika koefisien $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat kabupaten, sektor yang bersangkutan kontribusinya terhadap PDRB daerah yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di tingkat kabupaten.

Semakin tinggi koefisien LQ suatu sektor, semakin tinggi pula kemampuan bersaing suatu daerah dalam mengembangkan sektor tersebut. Metode LQ adalah indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan tentang besar/kecilnya suatu sektor di suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat kabupaten.

BAB IV

KONDISI UMUM KABUPATEN PURWOREJO

4.1. Keadaan Geografis dan Administratif.

Purworejo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, letaknya pada posisi $109^{\circ} 47'28''$ - $110^{\circ} 8'20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32'$ - $7^{\circ} 54'$ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen
2. Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Wonosobo
3. Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo (DIY)
4. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 494 desa/kelurahan.

4.2. Keadaan Iklim

Berdasarkan data pada tahun 2006, Kabupaten Purworejo mempunyai iklim tropis basah dengan suhu antara 19°C - 29°C , sedangkan kelembaban udara Kabupaten Purworejo antara 70% - 90%. Pada tahun 2006 curah hujan di Kabupaten Purworejo cukup tinggi dan tidak menentu. Pada musim penghujan, yaitu antara bulan Oktober sampai Maret, curah hujan di Kabupaten Purworejo antara 2.749–12.805 mm sedangkan pada musim kemarau, yaitu antara bulan April sampai oktober curah hujan antara 203–5.056 mm. Pada tahun 2006, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 12.805 mm sedang curah hujan terendah yaitu 203 mm yang terjadi pada bulan April.

4.3. Keadaan Kependudukan

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten purworejo tercatat sebesar 776.453 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 45,68% bekerja di sektor pertanian, 19,79% bekerja di sektor perdagangan, 13,23% bekerja di sektor jasa-jasa, serta 11,38% bekerja di sektor industri.

Berdasar umur penduduk dapat digolongkan menjadi 3 kelompok usia, yaitu usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia non produktif (60 tahun keatas). Keadaan penduduk menurut umur bagi suatu daerah dapat digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk yang produktif dan angka beban tanggungan (*dependency ratio*). Keadaan penduduk Kabupaten Purworejo menurut kelompok umur ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Penduduk Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2006

Kelompok Umur (th)	Jenis kelamin (orang)		Seks Rasio (%)	Jumlah (orang)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	19.610	18.748	104,60	38.358
5-9	32.199	31.409	102,52	63.608
10-14	35.740	35.064	102,50	70.804
15-19	37.735	36.819	102,49	74.554
20-24	35.079	31.372	111,82	66.451
25-29	25.387	23.930	106,09	49.317
30-34	24.437	25.465	95,96	49.902
35-39	26.600	29.335	90,68	55.935
40-44	28.534	30.931	92,25	59.465
45-49	26.423	27.320	96,72	53.743
50-54	20.979	20.997	99,91	41.976
55-59	13.753	15.654	87,86	29.407
60-64	13.848	16.509	83,88	30.357
65+	41.881	50.695	82,61	92.576
Total	382.205	394.248	96,95	776.453

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2006

Tabel 6 menunjukkan bahwa persentase terbesar penduduk Kabupaten Purworejo adalah penduduk usia produktif yaitu antara 15–59 tahun sebesar 61,92% dari total jumlah penduduk, sedangkan penduduk usia belum produktif dan non produktif sebesar 38,08% dari total jumlah penduduk. Angka beban tanggungan dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Dari hasil perhitungan diketahui angka beban tanggungan penduduk di Kabupaten Purworejo sebesar 61,51%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 62 penduduk usia belum produktif dan non produktif.

4.4. Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Pada tahun 2006, produktivitas padi sekitar 53,09 kuintal per hektar, luas panen padi sebesar 52.240 hektar dan produksi sebesar 277.336 ton. Sebagian besar produksi padi merupakan padi sawah, yaitu sekitar 99,37%.

Secara umum produktivitas per hektar tanaman palawija di Kabupaten Purworejo tahun 2006 sebagai berikut : jagung (37,77 ku/ha), ubi kayu (173,57 ku/ha), ubi jalar (129,10 ku/ha), kacang tanah (12,14 ku/ha), kacang kedelai (22,72 ku/ha), dan kacang hijau (10,01 ku/ha).

Secara umum, produksi beberapa jenis sayuran (cabe, tomat, wortel, kacang panjang, ketimun, dll) selama tahun 2006 sebagai berikut : cabe (13.941 kuintal), tomat (214 kuintal), kacang panjang (2.876 kuintal), ketimun (1.076

kuintal), terong (1.936 kuintal), kangkung (3.764 kuintal), dan bayam (619 kuintal).

Produksi beberapa jenis buah-buahan seperti mangga, rambutan, duku, kelengkeng, belimbing, durian, pisang, salak, jeruk, nanas dan pepaya dalam tahun 2006 sebagai berikut : mangga (35.494 kuintal), rambutan (78.658 kuintal), duku (1.786 kuintal), belimbing (1.118 kuintal), durian (45.261 kuintal), pisang (149.865 kuintal), salak (4.417 kuintal), jeruk (8.084 kuintal), nanas (1.268 kuintal), papaya (8.457 kuintal), melon (300 kuintal), semangka (18.304 kuintal), alpokat (339 kuintal), jambu biji (5.512 kuintal), jambu air (3.616 kuintal), manggis (1.798 kuintal), dan nangka (54.995 kuintal).

4.5. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber devisa sektor pertanian. Perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Luas areal tanaman perkebunan rakyat selama tahun 2006 adalah sebagai berikut : aren (328,71 ha), cengkeh (1.945,89 ha), jahe (156,20 ha), jambu mete (12,35 ha), kakao (45,79 ha), kapulaga (261,25 ha), karet (96 ha), kelapa (17.237,32 ha), kemukus (110,69 ha), kencur (540,60 ha), kopi (532,97 ha), kunyit (19 ha), lada (23 ha), melinjo (1.310 ha), mahkota dewa (331,08 ha), nilam (346,56 ha), panili (43,23 ha), tebu (762,49 ha), tembakau (169 ha), temulawak (573,68 ha), dan cengkeh (242,03 ha).

4.6. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Purworejo adalah ternak besar, yaitu sapi (potong/perah), kerbau dan kuda, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing, domba dan babi. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik dan burung puyuh) dan kelinci.

Populasi ternak besar pada tahun 2006 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing tercatat sebanyak 13.067 ekor, 2.202 ekor dan 248 ekor. Pada tahun 2006, populasi kambing, domba dan babi yang merupakan ternak kecil tercatat sebanyak 154.045 ekor, 43.974 ekor dan 37 ekor.

Populasi ternak unggas pada tahun 2006 untuk ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur, itik, puyuh, dan kelinci masing-masing tercatat sebanyak 676.934 ekor, 342.300 ekor, 24.900 ekor, 90.482 ekor, 92.658 ekor, dan 4.152 ekor.

Banyaknya ternak besar yang dipotong pada tahun 2006, untuk sapi tercatat sebesar 1.360 ekor, kerbau 199 ekor. Untuk ternak kecil yang paling banyak dipotong adalah kambing dan domba, yaitu sebanyak 21.579 ekor dan 17.752 ekor.

Produksi telur (ayam ras, ayam kampung, itik dan burung puyuh) tahun 2006 tercatat sebagai berikut : ayam ras sebesar 95.516 ton, ayam kampung sebesar 1.434.255 ton, itik sebesar 1.705.165 ton, burung puyuh sebesar 72.660 ton.

4.7. Perikanan

Sub sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari usaha budidaya (tambak, sawah, kolam, karamba) dan perairan umum (waduk, sungai, telaga dan rawa).

Produksi yang dihasilkan dari kegiatan perikanan laut pada tahun 2006 di Kabupaten Purworejo mencapai 30,6 ton dengan nilai 238.933,3 juta rupiah. Perikanan tambak mencapai 261,9 ton dengan nilai 2.037.546 juta rupiah. Perikanan kolam mencapai 484,86 ton dengan nilai 4.082.491 juta rupiah.

4.8. Kehutanan

Luas hutan yang tercatat di Kabupaten Purworejo 8.867 hektar. Menurut fungsinya hutan terbagi dalam hutan produksi (99,97%) dan hutan lindung (0,03%).

Luas penggunaan lahan dan luas kawasan hutan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2006 sebagai berikut : luas lahan (103.482 ha) dan luas kawasan hutan (8.291,54 ha) dan luas lahan kritis diluar kawasan hutan (96.638,24 ha).

4.9. Perindustrian

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai 99 orang, industri kecil, adalah perusahaan

dengan tenaga kerja 5 orang sampai 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai 5 orang.

Perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Purworejo pada tahun 2006 tercatat sebesar 22 unit perusahaan dengan 2.833 orang tenaga kerja. Pada tahun yang sama, nilai output industri besar dan sedang mencapai 86,834 milyar rupiah.

4.10. Pertambangan

Sektor pertambangan dengan kandungan sumber tambang yang cukup melimpah belum seluruhnya dapat digali maupun ditambangkan. Barang tambang seperti emas, tembaga, andesit, pasir besi dan barang tambang lainnya baru sedikit yang diusahakan. Pemerintah Kabupaten terus berupaya mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, utamanya bahan galian golongan C (pasir dan krikil, pasir urug, batu kapur, tanah liat, tanah urug, andesit dan lainnya). Luas areal bahan galian sirtu sebesar 11,61 hektar dan bahan galian tanah urug seluas 0,94 hektar.

4.11. Energi

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan roda perekonomian daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, pemerintah telah mengupayakan program listrik masuk desa, sehingga sampai tahun 2006 terdapat 469 desa sudah beraliran listrik dari PT PLN (Persero) sebagai sumber energinya, dengan jumlah pelanggan 122.457 pelanggan.

Jumlah energi listrik yang terjual selama tahun 2006 sebesar 150.709.854 kwh. Energi listrik tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh rumahtangga, berikutnya untuk usaha, selebihnya untuk industri, kantor pemerintah, penerangan jalan dan sosial.

4.12. Perdagangan

Di Kabupaten Purworejo tahun 2006 tercatat sebanyak 25 unit pasar tradisional. Dari ke 25 pasar tersebut ada 4 pasar yang tergolong besar dan mempunyai pedagang yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan pasar yang lain. Keempat pasar itu adalah Pasar Baledono sebanyak 308 pedagang, Pasar Kutoarjo sebanyak 263 pedagang, Pasar Pituruh sebanyak 93 pedagang, dan Pasar Kaliboto sebanyak 78 pedagang.

4.13. Transportasi dan Komunikasi

Panjang jalan diseluruh wilayah Kabupaten Purworejo pada tahun 2006 mencapai 1.040,42 kilometer. Banyaknya perusahaan otobus yaitu 82 buah dengan jumlah kendaraan sebanyak 366 unit. Bus antar kota dalam provinsi sejumlah 196 unit dan antar kota antar provinsi sejumlah (47 unit bus ekonomi, 123 unit bus eksekutif). Sedangkan untuk bus cadangan dalam provinsi sejumlah 15 unit dan cadangan luar provinsi sejumlah 20 unit.

Di Kabupaten Purworejo terdapat 16 Kantor Pos (1 kantor pemeriksa dan 15 kantor cabang). Dari 16 kantor tersebut, 9 kantor sudah online. Kegiatan operasional PT Pos Indonesia antara lain mengirim surat ke dalam negeri dan

keluar negeri. Selain itu instansi tersebut juga melayani kegiatan wesel pos, paket pos, tabanas serta penjualan benda pos.

4.14. Hotel dan Pariwisata

Pada tahun 2006 banyaknya usaha akomodasi di Kabupaten Purworejo sebanyak 14 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 296 kamar. Hotel tersebut semuanya termasuk dalam klasifikasi hotel melati, tidak ada yang termasuk dalam klasifikasi hotel bintang.

Pada tahun 2006 banyaknya objek wisata/taman rekreasi di Kabupaten Purworejo tercatat sebanyak 7 obyek wisata. Pada keadaan yang sama jumlah wisatawan total sebanyak 184.895 orang. Wisatawan tersebut terdiri dari wisatawan mancanegara yang mengunjungi obyek wisata sejumlah 47 orang dan wisatawan nusantara sejumlah 184.848 orang.

4.15. Keuangan

Realisasi penerimaan daerah pada tahun 2006 terhimpun sekitar 639.845.972 ribu rupiah. Realisasi belanja daerah sekitar 583.132.018 ribu rupiah. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 218.280 ribu rupiah. Pendapatan asli daerah terhimpun sekitar 32.024.961 ribu rupiah. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 4.732.823 ribu rupiah. Realisasi restribusi daerah sebesar 21.196.256 ribu rupiah dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 24.203.892 ribu rupiah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis *Tipologi Klassen*

Metode *Tipologi Klassen* digunakan untuk mengetahui pengelompokan kecamatan di Kabupaten Purworejo menurut struktur pertumbuhannya dengan membandingkan laju PDRB dan pendapatan perkapita ditingkat kecamatan dan ditingkat kabupaten. Dengan menggunakan *Matrix Tipologi Klassen* dapat dilakukan empat pengelompokan daerah yaitu daerah maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat, daerah maju tapi tertekan dan daerah relative tertinggal.

Laju PDRB menggambarkan kinerja sektor-sektor ekonomi disuatu daerah, semakin baik kinerja sektor-sektor ekonomi maka semakin tinggi pula laju PDRB. Kinerja sektor ekonomi antara lain dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia dan teknologi. Hal inilah yang membuat laju PDRB ditiap daerah berbeda-beda karena keberadaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi ditiap daerah tidak sama.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Dalam analisis *Tipologi Klassen* pendapatan perkapita menggambarkan kemampuan beli masyarakat, sedangkan laju PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah kemampuan sektor-sektor memproduksi barang atau jasa. Nilai rata-rata PDRB perkapita dan laju PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2000-2008 adalah sebesar Rp. 2.950.930,78 dan 4,39%. Sedangkan nilai rata-rata laju PDRB dan PDRB perkapita tahun 2000-

2006 pada kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel. 5.1. Rata-rata Laju PDRB dan PDRB Perkapita di Kecamatan-kecamatan dan di Kabupaten Purworejo Tahun 2000-2006.

Kecamatan	Rata-rata Laju PDRB Kecamatan (%)	Rata-rata Laju PDRB Kabupaten (%)	Rata-rata PDRB perkapita Kecamatan (Rp)	Rata-rata PDRB perkapita Kabupaten (Rp)
Grabag	4,33	4,39	2.388.997,14	2.950.930,78
Ngombol	2,87	4,39	2.839.922,86	2.950.930,78
Purwodadi	4,06	4,39	3.067.760,00	2.950.930,78
Bagelen	5,28	4,39	2.354.325,71	2.950.930,78
Kaligesing	6,02	4,39	2.367.614,29	2.950.930,78
Purworejo	4,07	4,39	5.192.940,00	2.950.930,78
Banyuurip	6,58	4,39	4.136.804,29	2.950.930,78
Bayan	4,28	4,39	2.430.295,71	2.950.930,78
Kutoarjo	5,55	4,39	3.904.065,71	2.950.930,78
Butuh	3,35	4,39	3.038.334,29	2.950.930,78
Pituruh	5,11	4,39	3.072.083,33	2.950.930,78
Kemiri	6,61	4,39	2.555.075,71	2.950.930,78
Bruno	2,20	4,39	2.122.812,86	2.950.930,78
Gebang	4,97	4,39	2.236.941,43	2.950.930,78
Loano	3,68	4,39	2.215.354,29	2.950.930,78
Bener	0,47	4,39	1.869.521,43	2.950.930,78

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Purworejo yang mempunyai nilai laju PDRB tertinggi adalah Kecamatan Kemiri

yaitu sebesar 6,61%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Kemiri, Kecamatan Banyuurip dan Kecamatan Kaligesing lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Purworejo.

Sedangkan untuk nilai PDRB perkapita tertinggi yaitu di Kecamatan Purworejo yaitu sebesar Rp. 5.192.940,00. Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan kota dan pusat perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar pada PDRB.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen sekitar 31,25% kecamatan di Kabupaten Purworejo berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel. 5.2. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo Menurut Tipologi Klassen

	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
	Banyuurip, Kutoarjo, Pituruh	Purwodadi, Purworejo, Butuh
$r_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal
	Bagelen, Kaligesing, Kemiri, Gebang	Grabag, Ngombol, Bruno, Loano, Bener

Sumber: Data olahan

Ket:

y_i = Laju PDRB Kecamatan di Kabupaten Purworejo

y = Laju PDRB Kabupaten Purworejo

r_i = Pendapatan perkapita Kecamatan di Kabupaten Purworejo

r = Pendapatan perkapita Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Tabel 5.2 kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh yaitu Banyuurip, Kutoarjo, dan Pituruh. Daerah tersebut digolongkan maju karena memiliki kinerja sektor-sektor ekonomi yang baik dan mempunyai daya beli masyarakat tinggi dibandingkan dengan tingkat kabupaten.

Artinya peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi akan direspon baik oleh pasar sehingga perekonomian maju pesat karena cepat tumbuh.

Sedangkan kecamatan yang merupakan daerah berkembang cepat yaitu Purwodadi, Purworejo, dan Butuh. Daerah ini mempunyai kinerja sektor ekonomi yang lebih rendah baik dibanding tingkat kabupaten, hal ini terlihat dimana laju PDRB kecamatan-kecamatan tersebut lebih rendah dari laju PDRB Kabupaten Purworejo, tetapi daerah tersebut mempunyai pangsa pasar yang besar, hal ini terlihat dari nilai PDRB perkapita kecamatan tersebut lebih tinggi dibanding tingkat kabupaten. Dengan potensi pasar yang besar tersebut akan memacu kinerja sektor-sektor ekonomi agar lebih baik lagi, sehingga kondisi yang demikian membuat perekonomian berkembang dengan cepat.

Daerah dengan klasifikasi daerah maju tapi tertekan di Kabupaten Purworejo yaitu Bagelen, Kaligesing, Kemiri, dan Gebang. Pada daerah maju tapi tertekan merupakan kondisi yang berkebalikan dengan daerah berkembang dengan cepat. Dilihat dari tingginya laju PDRB kecamatan dibandingkan dengan tingkat kabupaten, daerah tersebut mempunyai kinerja sektor-sektor ekonomi yang baik, tetapi kurang mendapatkan respon pasar karena daya beli masyarakat rendah, hal ini dilihat dari PDRB perkapita kecamatan lebih rendah dibandingkan tingkat Kabupaten Purworejo. Pada kondisi seperti ini daerah tersebut tidak bisa leluasa berkembang karena keterbatasan pangsa pasar sehingga dinamakan daerah maju tetapi tertekan.

Klasifikasi daerah yang terakhir adalah daerah yang relatif tertinggal. Kecamatan di Kabupaten Purworejo yang tergolong pada klasifikasi daerah relatif

tertinggal yaitu Grabag, Ngombol, Bruno, Loano, dan Bener. Pada klasifikasi ini jumlah kecamatannya terbanyak dibanding dengan klasifikasi yang lain yaitu sebesar 31,25%.

Hal diatas menjawab hipotesis 1 yaitu sebagian besar kecamatan di Kabupaten Purworejo tergolong pada daerah relative tertinggal. Daerah-daerah tersebut adalah daerah yang sulit untuk berkembang atau terbelakang karena daerah tersebut mempunyai kinerja sektor ekonomi yang lebih rendah dibandingkan tingkat kabupaten dan mempunyai pangsa pasar yang rendah karena mempunyai PDRB perkapita lebih kecil dibandingkan tingkat kabupaten.

5.2. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift-share* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi wilayah (kecamatan) relatif terhadap struktur ekonomi referensi (Kabupaten Purworejo). Analisis *Shift Share* dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi pada kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Pertumbuhan PDRB total (D_{ij}) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*, yaitu:

- a. Komponen *Nasional Share*/Pertumbuhan Nasional (N_{ij}) adalah banyaknya pertambahan PDRB kecamatan seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo selama periode studi.

- b. Komponen *Proportional Shift*/Bauran Industri (M_{ij}), mengukur besarnya *net shift* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB kecamatan di Kabupaten Purworejo yang berubah. Apabila $M_{ij} > 0$, artinya kecamatan berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Kabupaten Purworejo yang tumbuh relatif cepat dan apabila $M_{ij} < 0$, berarti kecamatan berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Kabupaten Purworejo pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun.
- c. Komponen *Differential Shift*/Keunggulan Kompetitif (C_{ij}), mengukur besarnya *net shift* yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di kecamatan dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional *intern*, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *Differential Shift Component* positif ($C_{ij} > 0$), sebaliknya apabila secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai *Differential Shift Component* yang negatif ($C_{ij} < 0$)

Hasil perhitungan analisis *shift share* PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2000-2006 dapat dilihat pada Tabel 5.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Purworejo yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Kecamatan Purworejo yaitu sebesar Rp. 103.196,36 juta rupiah. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi terkecil adalah Kecamatan Bener yang hanya sebesar Rp. 1.975,93 juta rupiah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada kinerja sektor-sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor dari luar daerah dan dari dalam daerah. Faktor luar daerah yang mempengaruhi adalah adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan

masuknya investor kedaerah tersebut, sedangkan faktor dari dalam daerah yang mempengaruhi adalah jumlah dan kualitas tenaga kerja, sumberdaya alam yang dimiliki serta kemajuan teknologi didaerah tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan, pertumbuhan ekonomi dibentuk oleh tiga komponen pertumbuhan yaitu pertumbuhan nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif. Setiap daerah mempunyai komposisi komponen pertumbuhan yang berbeda-beda tergantung kemampuan daerah tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat di Tabel 5.3 diketahui bahwa komponen terbesar yang menyusun pertumbuhan ekonomi seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}), dilihat dari kontribusi komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}) paling besar dibanding komponen pertumbuhan yang lain, hal ini menjawab hipotesis 2 yaitu sebagian besar kecamatan di Kabupaten Purworejo disusun oleh komponen pertumbuhan nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah disusun oleh komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}) berarti pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dipengaruhi faktor dari luar daerah karena kenaikan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo. Daerah yang mempunyai komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}) terbesar adalah Kecamatan Purworejo.

Tabel. 5.3. Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo.

No	Kecamatan	Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
		Pertumbuhan Nasional (N _{ij})	Bauran Industri (M _{ij})	Keunggulan Kompetitif (C _{ij})	(Pertumbuhan) (D _{ij})
1	Grabag	28.799,61	(3.976,96)	3.511,05	28.333,69
2	Ngombol	27.318,93	(5.153,64)	(5.348,18)	16.817,11
3	Purwodadi	30.988,54	(2.985,29)	(153,45)	27.849,81
4	Bagelen	19.436,74	(1.211,04)	5.789,19	24.014,88
5	Kaligesing	18.910,34	(2.566,71)	10.774,89	27.118,52
6	Purworejo	111.739,36	27.540,29	(36.083,29)	103.196,36
7	Banyuurip	36.336,97	1.544,49	19.385,32	57.266,78
8	Bayan	27.324,39	(946,12)	266,32	26.644,58
9	Kutoarjo	57.489,09	15.389,07	2.544,87	75.423,03
10	Butuh	33.879,54	(4.042,79)	(4.581,61)	25.255,14
11	Pituruh	35.521,24	(5.539,42)	12.250,41	42.232,23
12	Kemiri	30.117,17	(4.400,17)	21.411,74	47.128,74
13	Bruno	23.048,55	(4.142,62)	(8.370,02)	10.535,91
14	Gebang	21.897,70	(1.762,77)	5.034,54	25.169,47
15	Loano	18.931,45	(409,35)	(2.926,43)	15.595,66
16	Bener	28.624,47	(3.143,20)	(23.505,35)	1.975,93

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa kecamatan yang pertumbuhan ekonominya disusun oleh komponen bauran industri (M_{ij}) adalah Kecamatan

Purworejo, Banyuurip, dan Kutoarjo. Hal tersebut terlihat dari nilai M_{ij} yang positif yang artinya daerah-daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang relatif tinggi di tingkat Kabupaten Purworejo. Daerah yang mempunyai komponen bauran industri yang paling tinggi di Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Purworejo, artinya Kecamatan Purworejo lebih banyak berspesialisasi pada sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang relatif tinggi di tingkat Kabupaten Purworejo seperti berspesialisasi pada sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya disusun oleh komponen keunggulan kompetitif (C_{ij}) yaitu Kecamatan Grabag, Bagelen, Kaligesing, Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, Pituruh, Kemiri, dan Gebang. Hal ini dapat dilihat dari nilai C_{ij} yang positif. Daerah yang mempunyai komponen pertumbuhan keunggulan kompetitif artinya daerah tersebut mempunyai sektor-sektor yang laju pertumbuhannya lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan sektor yang sama ditingkat Kabupaten Purworejo. Tingginya laju pertumbuhan sektor suatu daerah tersebut dikarenakan adanya keunggulan kompetitif daerah dimana sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi yang menguntungkan di daerah tersebut. Keuntungan lokasi ini antara lain kekayaan alam daerah tersebut yang berhubungan dengan ketersediaan bahan baku, kemudahan akses transportasi, kedekatan dengan pasar dan lain sebagainya. Keuntungan lokasi ini sangat

menunjang kegiatan sektor-sektor ekonomi suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang.

5.3. Analisis *Location Quotient*

Analisis LQ berfungsi untuk menentukan sektor basis yang akan diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sektor dikatakan basis apabila sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal daerahnya dan mampu melakukan ekspor keluar daerah (nilai $LQ > 1$) dan dikatakan non basis apabila suatu sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal daerahnya saja ($LQ \leq 1$). Sektor basis sangat diprioritaskan dalam pembangunan karena sektor basis mempunyai efek pengganda dalam perekonomian, yaitu sektor basis mampu melakukan ekspor keluar daerah sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, lebih lanjut tingginya pendapatan tersebut akan meningkatkan permintaan sektor non basis sehingga sektor non basis bisa berkembang.

Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 kecamatan. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* yaitu pada Tabel 5.4 terlihat bahwa sektor basis yang paling banyak terdapat pada kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sektor pertanian yaitu sebesar 75,00% dari jumlah kecamatan, menyusul kemudian sektor pertambangan dan penggalian sebesar 62,50% dari jumlah kecamatan. Sedangkan sektor basis yang paling sedikit terdapat pada kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, yaitu masing-masing sebesar 12,50% dari jumlah kecamatan.

Tabel 5.4 Klasifikasi Sektor Basis Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo.

No	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah sektor (%)
1	Grabag	1,44	1,81	0,66	1,07	0,53	0,96	0,38	0,58	0,62	33,33
2	Ngombol	1,52	1,47	0,23	0,89	0,56	0,91	0,41	0,44	0,80	22,22
3	Purwodadi	1,19	1,18	0,66	1,21	0,74	1,07	0,92	0,58	0,90	44,44
4	Bagelen	1,16	0,91	0,79	0,90	0,53	1,15	1,03	0,74	0,85	33,33
5	Kaligesing	1,30	0,99	0,82	0,73	0,25	1,16	0,38	0,44	0,88	22,22
6	Purworejo	0,31	0,44	1,78	0,99	2,19	0,82	1,08	2,10	1,61	55,55
7	Banyuurip	0,84	1,15	2,32	1,21	0,86	1,00	1,26	0,59	0,73	44,44
8	Bayan	1,02	1,56	1,34	1,47	0,83	1,00	0,79	0,62	0,90	44,44
9	Kutoarjo	0,59	0,53	0,99	0,89	1,08	1,18	2,47	1,85	1,08	55,55
10	Butuh	1,33	0,79	0,55	0,80	0,74	1,03	0,69	0,57	0,82	22,22
11	Pituruh	1,49	0,99	0,54	0,78	0,65	0,94	0,36	0,54	0,69	11,11
12	Kemiri	1,42	1,44	0,31	0,91	0,36	1,02	0,41	0,58	0,87	33,33
13	Bruno	1,57	1,51	0,19	1,02	0,58	0,86	0,59	0,57	0,65	33,33
14	Gebang	1,13	1,26	0,47	0,99	0,68	1,21	1,04	0,45	0,99	44,44
15	Loano	1,00	1,22	0,74	1,09	0,71	1,14	1,35	0,58	1,07	55,55
16	Bener	1,21	1,04	0,64	1,18	0,90	1,02	1,16	0,47	0,82	55,55
	Jumlah Kecamatan (%)	75,00	62,50	18,75	43,75	12,50	56,25	43,75	12,50	18,75	

Sumber: Data olahan

- Ket : 1. Pertanian
 2. Pertambangan & Penggalian
 3. Industri Pengolahan
 4. Listrik, Gas & Air Bersih
 5. Bangunan
 6. Perdagangan, Hotel & Restoran
 7. Pengangkutan & Komunikasi
 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
 9. Jasa-jasa

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa tiap kecamatan mempunyai sektor basis yang berbeda-beda, dengan jumlah sektor basis yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kinerja sektor-sektor ekonomi di tiap daerah yang antara lain dipengaruhi kekayaan alam, potensi sumberdaya manusia, bahkan kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Semakin besar nilai LQ

maka semakin tinggi kinerja sektor tersebut dibandingkan sektor lain atau sektor di daerah lain, sehingga nilai LQ menggambarkan keunggulan kompetitif suatu sektor ekonomi di suatu daerah. Daerah yang paling banyak memiliki sektor basis adalah Kecamatan Purworejo, Kutoarjo, Loano, dan Bener yaitu memiliki 55,55% sektor basis. Sedangkan sektor yang mempunyai kinerja paling bagus di Kabupaten Purworejo adalah sektor pengangkutan dan komunikasi di Kecamatan Kutoarjo yaitu memiliki LQ rata-rata sebesar 2,47.

Berdasarkan Tabel 5.4 menjawab hipotesis 3 yaitu sebagian besar kecamatan di Kabupaten Purworejo mempunyai sektor basis pada sektor pertanian. Di Kabupaten Purworejo sebesar 75,00% dari jumlah kecamatan mempunyai sektor basis pertanian. Daerah yang mempunyai sektor basis pertanian semuanya adalah kecamatan diluar kota. Kecamatan yang memiliki nilai LQ sektor pertanian yang paling besar adalah Kecamatan Bruno yaitu sebesar 1,57.

Berdasarkan analisis sektor basis ini menunjukkan gambaran kinerja sektor-sektor ekonomi di tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya yaitu dengan meningkatkan kinerja sektor basis dan memacu kinerja sektor non basis untuk bisa menjadi sektor basis.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi kecamatan di Kabupaten Purworejo berdasarkan Tipologi Klassen:
 - a. Daerah maju dan cepat tumbuh yaitu Kecamatan Banyuurip, Kutoarjo, dan Pituruh.
 - b. Daerah yang berkembang cepat yaitu Kecamatan Purwodadi, Purworejo, dan Butuh.
 - c. Daerah maju tapi tertekan yaitu Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Kemiri, dan Gebang.
 - d. Daerah relatif tertinggal yaitu Kecamatan Grabag, Ngombol, Bruno, Loano, dan Bener.
2. Seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo pergeseran struktur ekonominya sebagian besar disusun oleh komponen pertumbuhan nasional.
3. Sektor yang menjadi sektor basis pada sebagian besar kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sektor pertanian.

6.2. Saran

1. Pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan sektor basis dalam pembangunan daerahnya, karena sektor basis berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan memacu permintaan sektor-sektor non basis sehingga kemudian bisa berkembang menjadi sektor basis.
2. Sektor pertanian yang merupakan sektor basis pada sebagian besar kecamatan perlu didorong terus pertumbuhannya dengan cara mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengembangan sektor pertanian agar tetap menjadi basis pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Bendavid-Val, A. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Praeger Publisher. New York.
- Blakley, E, J. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice, Second edition*. Saege Publication, Inc. California.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan, Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.
- BPS. Berbagai Tahun Penerbitan. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 2000 – 2006*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo.
- BPS. 2006. *Purworejo Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo.
- Jubaedah, A., 2001, *Identifikasi Sektor Ekonomi dan Prospek Pengembangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. *Unpublished*.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Kedua*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Nastiti, R., 2002. *Analisis Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. *Unpublihsed*.
- Prayitno, Hadi & Santosa, Budi. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Richardson, H. W. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan oleh Paul Sitohang. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES.
- Sudjijono, Budi. 2008. *Resesi Dunia & Ekonomi Indonesia*. Golden Terayon Press. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Kedua. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembanguna Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama.Jakarta.
- Suyatno, 2000, *Analisis Economic Base terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 5/1999 dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi. FE UMS. Surakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Alih bahasa Munandar.H, Fuji.A.L). Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan Teori dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Lampiran 1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo Menurut Tipologi Klassen

No	Kecamatan	Rata-Rata Laju PDRB	Rata-rata Laju PDRB Kabupaten	Rata-rata PDRB Perkapita	Rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Purworejo	Klasifikasi
1	Grabag	4.33	4.39	2,388,997.14	2,950,930.78	Relatif Tertinggal
2	Ngombol	2.87	4.39	2,839,922.86	2,950,930.78	Relatif Tertinggal
3	Purwodadi	4.06	4.39	3,067,760.00	2,950,930.78	Berkembang Cepat
4	Bagelen	5.28	4.39	2,354,325.71	2,950,930.78	Maju Tapi Tertekan
5	Kaligesing	6.02	4.39	2,367,614.29	2,950,930.78	Maju Tapi Tertekan
6	Purworejo	4.07	4.39	5,192,940.00	2,950,930.78	Berkembang Cepat
7	Banyuurip	6.58	4.39	4,136,804.29	2,950,930.78	Maju dan Cepat Tumbuh
8	Bayan	4.28	4.39	2,430,295.71	2,950,930.78	Relatif Tertinggal
9	Kutoarjo	5.55	4.39	3,904,065.71	2,950,930.78	Maju dan Cepat Tumbuh
10	Butuh	3.35	4.39	3,038,334.29	2,950,930.78	Berkembang Cepat
11	Pituruh	5.11	4.39	3,072,083.33	2,950,930.78	Maju dan Cepat Tumbuh
12	Kemiri	6.61	4.39	2,555,075.71	2,950,930.78	Maju Tapi Tertekan
13	Bruno	2.20	4.39	2,122,812.86	2,950,930.78	Relatif Tertinggal
14	Gebang	4.97	4.39	2,236,941.43	2,950,930.78	Maju Tapi Tertekan
15	Loano	3.68	4.39	2,215,354.29	2,950,930.78	Relatif Tertinggal
16	Bener	0.47	4.39	1,869,521.43	2,950,930.78	Relatif Tertinggal

Lampiran 2. Pergeseran Struktur Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
		Pertumbuhan Nasional	Bauran Industri	Keunggulan Kompetitif	(Pertumbuhan)
		(Nij)	(Mij)	(Cij)	(Dij)
1	Grabag	28,799.61	(3,976.96)	3,511.05	28,333.69
2	Ngombol	27,318.93	(5,153.64)	(5,348.18)	16,817.11
3	Purwodadi	30,988.54	(2,985.29)	(153.45)	27,849.81
4	Bagelen	19,436.74	(1,211.04)	5,789.19	24,014.88
5	Kaligesing	18,910.34	(2,566.71)	10,774.89	27,118.52
6	Purworejo	111,739.36	27,540.29	(36,083.29)	103,196.36
7	Banyuurip	36,336.97	1,544.49	19,385.32	57,266.78
8	Bayan	27,324.39	(946.12)	266.32	26,644.58
9	Kutoarjo	57,489.09	15,389.07	2,544.87	75,423.03
10	Butuh	33,879.54	(4,042.79)	(4,581.61)	25,255.14
11	Pituruh	35,521.24	(5,539.42)	12,250.41	42,232.23
12	Kemiri	30,117.17	(4,400.17)	21,411.74	47,128.74
13	Bruno	23,048.55	(4,142.62)	(8,370.02)	10,535.91
14	Gebang	21,897.70	(1,762.77)	5,034.54	25,169.47
15	Loano	18,931.45	(409.35)	(2,926.43)	15,595.66
16	Bener	28,624.47	(3,143.20)	(23,505.35)	1,975.93

Lampiran 3. Rata-rata LQ Sektor-sektor Ekonomi Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo

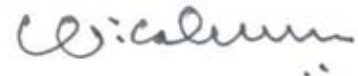
No	Lapangan Usaha	Grabag	Ngombol	Purwodadi	Bagelen	Kaligesing	Purworejo	Banyuurip	Bayan	Kutoarjo	Butuh	Pituruh	Kemiri	Bruno	Gebang	Loano	Bener
1	Pertanian	1.44	1.52	1.19	1.16	1.30	0.31	0.84	1.02	0.59	1.33	1.49	1.42	1.57	1.13	1.00	1.21
2	Pertambangan & Penggalian	1.81	1.47	1.18	0.91	0.99	0.44	1.15	1.56	0.53	0.79	0.99	1.44	1.51	1.26	1.22	1.04
3	Industri Pengolahan	0.66	0.23	0.66	0.79	0.82	1.78	2.32	1.34	0.99	0.55	0.54	0.31	0.19	0.47	0.74	0.64
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1.07	0.89	1.21	0.90	0.73	0.99	1.21	1.47	0.89	0.80	0.78	0.91	1.02	0.99	1.09	1.18
5	Bangunan	0.53	0.56	0.74	0.53	0.25	2.19	0.86	0.83	1.08	0.74	0.65	0.36	0.58	0.68	0.71	0.90
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	0.96	0.91	1.07	1.15	1.16	0.82	1.00	1.00	1.18	1.03	0.94	1.02	0.86	1.21	1.14	1.02
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.38	0.41	0.92	1.03	0.38	1.08	1.26	0.79	2.47	0.69	0.36	0.41	0.59	1.04	1.35	1.16
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.58	0.44	0.58	0.74	0.44	2.10	0.59	0.62	1.85	0.57	0.54	0.58	0.57	0.45	0.58	0.47
9	Jasa-jasa	0.62	0.80	0.90	0.85	0.88	1.61	0.73	0.90	1.08	0.82	0.69	0.87	0.65	0.99	1.07	0.82

RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI

Nama : Istiko Agus Wicaksono, S.P.
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 4 Juli 1977
Pangkat/Golongan/NBM : Asisten Ahli/IIIa/898.362
Pendidikan Terakhir : S1 Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Pengalaman Penelitian :

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Anggota, Tahun 2002).
2. Analisis Usahatani Kubis Bunga (*Brassica oleracea* var. *Botrytis* L.) Dataran Rendah di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo (Anggota, Tahun 2002).
3. Analisis Usahatani Pembibitan Jeruk Siam (*Citrus nobilis* Lour var. *Microcarpa*) di Kec. Bayan Kab. Purworejo (Ketua, Tahun 2002).
4. Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh dan Pilot Project Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo (Anggota, Tahun 2003)

Purworejo, Desember 2008



Istiko Agus Wicaksono, S.P.